eISSN 3090-174X & pISSN 3090-
Vol. 2, No. 4, Tahun 2026
doi.org/10.63822/n57ft145
Hal. 8861-8870

Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Beranda Jurnal https://indojurnal.com/index.php/jisoh

Analisis Pengelolaan Aset Desa melalui SIPADES dalam Perspektif *Good Governance* di Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan

Salsabila Putri Ramadhani[1], Shania Mirza[2], Erlyn Veranita[4], Deby Febriyan Eprilianto[5], Revienda Anita Fitrie[6]
Program Studi S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Negeri Surabaya, Kota Surabaya, Indonesia[1-6]

*Email Korespodensi: 24040674079@mhs.unesa.ac.id

Diterima: 12-11-2026 | Disetujui: 17-11-2026 | Diterbitkan: 19-11-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze village asset management through the Village Asset Management System (SIPADES) from the perspective of good governance in Angseri Village, Baturiti Subdistrict, Tabanan Regency. This study employs a qualitative method with a descriptive approach. The data used are secondary data obtained through documentary and literature reviews, including official village government publications, laws and regulations, scientific journals, and relevant books. Data analysis was conducted using the model proposed by Miles, Huberman, and Saldaña (2014) through three stages: data condensation, data presentation, and drawing conclusions and verification. The analysis was conducted based on the five principles of good governance: transparency, accountability, effectiveness, efficiency, and responsiveness. The results indicate that the implementation of SIPADES 3.0 assists the village government in conducting asset inventory, recording, verification, and reporting in a more structured manner. This implementation is an effort to improve administrative order and accountability in the management of village assets. However, there are still several aspects that need attention, particularly the updating of inventory data, the completeness of ownership documents, transparency of information to the public, and follow-up on evaluation results. Thus, the optimization of SIPADES does not only depend on the use of technology but also requires support in the form of capable officials and continuous oversight.

Keywords: *Village Asset Management; SIPADES; Good Governance; Digitization; Village Government*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset desa melalui Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) dalam perspektif Good Governance di Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan studi literatur, meliputi publikasi resmi pemerintah desa, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan buku yang relevan. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) melalui tiga tahapan, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis dilakukan berdasarkan lima prinsip *Good Governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan responsivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPADES 3.0 membantu pemerintah desa dalam melakukan inventarisasi, pencatatan, verifikasi, serta penyusunan laporan aset secara lebih terstruktur. Penerapan ini menjadi upaya untuk meningkatkan tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan aset desa. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, terutama pembaruan data

inventaris, kelengkapan dokumen kepemilikan, keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta tindak lanjut hasil evaluasi. Dengan demikian, optimalisasi SIPADES tidak hanya bergantung pada penggunaan teknologi, tetapi juga memerlukan dukungan kemampuan aparatur dan pengawasan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengelolaan Aset Desa; SIPADES; *Good Governance*; Digitalisasi; Pemerintahan Desa

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Ramadhani, S. P. ., Mirza, S., Veranita, E. ., Eprilianto, D. F., & Fitrie, R. A. . (2026). Analisis Pengelolaan Aset Desa melalui SIPADES dalam Perspektif Good Governance di Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(4), 8861-8870. https://doi.org/10.63822/n57ft145

PENDAHULUAN

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan hak asal-usul dan kewenangan lokal. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, pemerintah desa dituntut secara mandiri untuk mampu mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab (Nurdianti, 2022). Salah satu sumber daya yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu aset desa. Aset desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset desa tidak hanya berfungsi sebagai sarana penunjang dalam kegiatan administrasi pemerintahan, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Putri, 2026).

Pengelolaan terhadap aset desa menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan karena berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah desa dalam menjaga, mengembangkan, dan memanfaatkan kekayaan yang dimiliki untuk kepentingan bersama. Pengelolaan desa tidak hanya berkaitan dengan kegiatan administrasi, seperti pencatatan barang milik desa, tetapi juga mencakup semua proses yang ada pada pengelolaan aset desa. Menurut Nurdinawati dalam (Putri, 2026:112) pengelolaan aset desa merupakan suatu rangkaian kegiatan terhadap kekayaan milik desa mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yang harus dijalankan sesuai dengan asas atau prinsip dasar Barang Milik Negara. Proses tersebut menjadi upaya penting dalam pengelolaan aset desa untuk mencegah ketidaksesuaian data administrasi dengan kondisi fisik aset, keterlambatan pembaruan inventarisasi, serta belum optimalnya pemanfaatan dari aset yang dimiliki.

Dengan adanya proses pengelolaan tersebut menuntut adanya sistem administrasi yang tertib dan transparan mengenai jumlah, jenis, kondisi, lokasi, nilai, dan, status kepemilikan dari aset yang ada. Salah satu instrumen yang dikembangkan pemerintah dalam mendukung proses tersebut adalah Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES). SIPADES merupakan sistem berbasis digital yang diciptakan untuk memudahkan pemerintah desa dalam proses pengelolaan aset desa yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi (Nurdianti, 2022). Melalui penerapan sistem ini, informasi mengenai aset desa diharapkan dapat terdokumentasi secara terstruktur sehingga memudahkan pemerintah dalam melakukan tindakan pengendalian, pengawasan, dan mampu mengurangi pencatatan maupun penyusunan laporan secara manual yang berpotensi adanya ketidaksesuaian data dengan kondisi fisik aset (Ulfa, 2025). Dengan keberadaan sistem ini tidak secara otomatis akan menjamin terciptanya pengelolaan aset yang sistematis. Efektivitas dari penerapan sistem akan bergantung pada kemampuan para aparatur dalam mengoperasikan sistem, keakuratan data yang tertera, kedisiplinan dalam melakukan pembaruan informasi, serta konsistensi pemerintah desa dalam menggunakan SIPADES sebagai bagian dari proses pengelolaan desa. Hal ini sejalan dengan konsep Good Governance yang menekankan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan responsivitas. Dalam pengelolaan aset desa, transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai aset yang dimiliki agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan (Hidayah, 2025). Akuntabilitas menekankan kejelasan

tanggung jawab aparatur dalam setiap tahapan pengelolaan aset (Hidayah, 2025). Efektivitas berkaitan dengan kemampuan pemerintah untuk mencapai tujuan pengelolaan, sedangkan efisiensi menekankan penggunaan sumber daya secara tepat (Hidayah, 2025). Responsivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam menindaklanjuti kebutuhan dan permasalahan yang muncul dalam pengelolaan aset desa (Hidayah, 2025).

Salah satu pemerintah desa yang berupaya mengembangkan pengelolaan aset berbasis digital yaitu Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Berdasarkan publikasi resmi Pemerintah Desa Angseri pada 2 Januari 2026, pemerintah desa telah menerapkan SIPADES 3.0 sebagai langkah strategis dalam mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pengelolaan aset milik desa secara terintegrasi. Aset yang dikelola meliputi tanah kas desa, gedung dan bangunan, jalan desa, jaringan irigasi, kendaraan dinas, peralatan dan mesin, serta aset tetap lainnya. Setiap aset dilengkapi dengan informasi mengenai kode barang, lokasi, luas atau ukuran, nilai perolehan, tahun pengadaan, sumber dana, dan kondisi barang. Proses penerapannya juga mencakup inventarisasi fisik dan administrasi, penginputan data, verifikasi dan validasi, hingga penyusunan laporan inventaris serta rekapitulasi aset tahunan (Tim Redaksi Website Desa Angseri, 2026). Meskipun demikian, penerapan SIPADES di Desa Angseri tidak dapat langsung dimaknai sebagai bukti bahwa seluruh aspek pengelolaan aset telah berjalan optimal. Hal ini terlihat pada publikasi pemerintah desa pada 24 September 2025 mengenai kegiatan evaluasi aset desa bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan menunjukkan bahwa hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) menjadi dasar untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, seperti pemutakhiran data inventaris, penertiban dokumentasi kepemilikan, dan optimalisasi pemanfaatan aset untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya, pada 18 Mei 2026, Pemerintah Desa Angseri kembali mengikuti kegiatan monev pengelolaan aset yang menekankan pentingnya tertib administrasi, efektivitas pemanfaatan, serta akuntabilitas pengelolaan aset (Humas Pemerintah Desa Angseri, 2026). Rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan aset tidak hanya untuk meningkatkan ketertiban secara administratif, tetapi menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas pengelolaan kekayaan publik di tingkat desa (Nasir, 2026). Keberhasilan pengelolaan aset desa berbasis digital tidak hanya diukur dari tersedianya aplikasi, kecepatan penyusunan, dan kelengkapan data. Tetapi juga perlu memperhatikan keberadaan sistem tersebut dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan responsivitas dalam pengelolaan aset desa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan aset desa melalui SIPADES, serta mengidentifikasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Good Governance. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Ilmu Administrasi Negara, khususnya mengenai digitalisasi administrasi pemerintahan dan tata kelola aset publik di tingkat desa. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pengelolaan aset yang lebih tertib, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pengelolaan aset desa melalui Sistem

Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, serta melihat penerapannya berdasarkan prinsip *Good Governance*. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menjelaskan pelaksanaan pengelolaan aset desa berdasarkan informasi yang diperoleh dari dokumen dan sumber literatur yang relevan. Fokus penelitian diarahkan pada penerapan SIPADES 3.0 dalam mendukung pengelolaan aset Desa Angseri. Analisis dilakukan berdasarkan lima prinsip Good Governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan responsivitas. Selain itu, penelitian juga memperhatikan proses inventarisasi, pencatatan, pembaruan data, pengamanan, pemeliharaan, serta pemanfaatan aset desa. Fokus tersebut digunakan untuk mengetahui peran SIPADES dalam mendukung tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pengelolaan kekayaan desa.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah tersedia. Sumber data meliputi publikasi resmi Pemerintah Desa Angseri, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan buku yang berkaitan dengan pengelolaan aset desa serta Good Governance. Salah satu sumber utama penelitian ini adalah publikasi Pemerintah Desa Angseri pada 2 Januari 2026 mengenai penerapan SIPADES 3.0 dan publikasi pada 23 September 2025 mengenai kegiatan evaluasi pengelolaan aset desa bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan. Kedua publikasi tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan sistem dan upaya evaluasi pengelolaan aset di Desa Angseri.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah informasi dan publikasi resmi yang berkaitan dengan penerapan SIPADES serta kegiatan evaluasi pengelolaan aset Desa Angseri. Sementara itu, studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari jurnal ilmiah, buku, serta peraturan yang relevan dengan topik penelitian. Informasi dari berbagai sumber tersebut kemudian dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan fokus penelitian agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis.

Teknik analisis data mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kondensasi data dilakukan dengan memilih dan memusatkan perhatian pada informasi yang berkaitan dengan pengelolaan aset desa melalui SIPADES dan prinsip *Good Governance*. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif agar informasi yang diperoleh dapat dipahami dan dianalisis secara sistematis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menghubungkan informasi dari dokumen dengan konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan SIPADES dalam Pengelolaan Aset Desa Angseri

Pengelolaan aset desa merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Aset yang dimiliki desa perlu dicatat dan dikelola dengan baik agar keberadaan serta pemanfaatannya dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, yang kemudian mengalami perubahan melalui Permendagri Nomor 3 Tahun 2024. Salah satu hal yang diatur dalam peraturan tersebut adalah penatausahaan dan pelaporan aset desa (Kementerian Dalam Negeri, 2016; Kementerian Dalam Negeri, 2024). Berdasarkan informasi pada website resmi Pemerintah Desa Angseri, desa ini telah menggunakan aplikasi Sistem Pengelolaan Aset

Desa (SIPADES) 3.0 untuk membantu proses pencatatan aset. Informasi yang dipublikasikan pada 2 Januari 2026 menyebutkan bahwa aset Desa Angseri meliputi tanah kas desa, gedung dan bangunan seperti kantor desa dan Pustu, jalan desa, jaringan irigasi, kendaraan dinas, peralatan dan mesin, serta aset tetap lainnya (Pemerintah Desa Angseri, 2026). Dalam aplikasi SIPADES, setiap aset dicatat berdasarkan beberapa informasi, seperti kode barang, lokasi, luas atau ukuran, nilai perolehan, tahun pengadaan, sumber dana, dan kondisi barang. Pencatatan tersebut membantu pemerintah desa mengetahui aset yang dimiliki sekaligus memudahkan penyusunan laporan. Pemerintah Desa Angseri juga menjelaskan bahwa proses pengelolaan dilakukan melalui inventarisasi fisik dan administrasi, input data ke aplikasi, verifikasi dan validasi, hingga penyusunan laporan aset desa (Pemerintah Desa Angseri, 2026). Jika dilihat dari proses tersebut, penggunaan SIPADES dapat membantu Desa Angseri dalam menata administrasi aset agar lebih terstruktur. Namun, penggunaan aplikasi belum otomatis menjamin seluruh data aset sudah benar dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Pemerintah desa tetap perlu melakukan pemeriksaan dan pembaruan data secara berkala. Dengan begitu, informasi yang tersimpan dalam aplikasi dapat digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset desa.

Pengelolaan Aset Desa Angseri dalam Perspektif *Good Governance*

Penerapan SIPADES di Desa Angseri dapat dilihat melalui beberapa prinsip good governance, terutama transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan responsivitas. Prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk melihat apakah penggunaan aplikasi sudah mendukung pengelolaan aset yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

a. Transparansi

   Transparansi berkaitan dengan keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan aset. Melalui SIPADES, data aset seperti jenis barang, lokasi, nilai perolehan, dan kondisi barang dapat dicatat secara lebih teratur. Pencatatan ini menjadi salah satu langkah untuk mengurangi ketidakjelasan informasi mengenai aset yang dimiliki desa. Namun, transparansi tidak cukup hanya dengan mencatat aset melalui aplikasi. Informasi mengenai aset juga perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan informasi yang tersedia, belum dapat dipastikan sejauh mana masyarakat Desa Angseri dapat mengakses informasi aset tersebut. Oleh karena itu, penggunaan SIPADES dapat mendukung transparansi dari sisi administrasi, tetapi keterbukaan informasi kepada masyarakat masih perlu diperhatikan.

b. Akuntabilitas

   Akuntabilitas berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola dan melaporkan aset yang dimiliki. Dalam hal ini, SIPADES membantu pencatatan aset karena setiap barang memiliki informasi yang lebih jelas, mulai dari lokasi, tahun pengadaan, sumber dana, hingga kondisi barang. Data tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan dan pemeriksaan aset. Pentingnya akuntabilitas juga terlihat dari kegiatan rapat evaluasi aset yang diikuti Pemerintah Desa Angseri bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan pada September 2025. Dalam kegiatan tersebut, terdapat beberapa hal yang masih perlu diperhatikan, seperti pembaruan data inventaris dan penertiban dokumen kepemilikan aset (Pemerintah Desa Angseri, 2025). Informasi tersebut menunjukkan bahwa pencatatan melalui

aplikasi perlu didukung dengan dokumen kepemilikan yang lengkap. Jika data dalam aplikasi tidak sesuai dengan dokumen atau kondisi aset sebenarnya, pemerintah desa akan mengalami kesulitan ketika harus mempertanggungjawabkan aset yang dikelola. Karena itu, SIPADES perlu digunakan bersama dengan administrasi aset yang tertib.

c. Efektivitas dan Efisiensi

Penggunaan SIPADES diharapkan dapat mempermudah pemerintah desa dalam melakukan pencatatan dan penyusunan laporan aset. Melalui sistem digital, data aset dapat disimpan dan dicari dengan lebih mudah. Pemerintah Desa Angseri juga menyebutkan bahwa aplikasi ini digunakan untuk menghasilkan laporan seperti Buku Inventaris Aset Desa, Kartu Inventaris Barang (KIB), Laporan Mutasi Aset, dan rekapitulasi aset tahunan (Pemerintah Desa Angseri, 2026). Hal tersebut sejalan dengan penelitian Prayitno (2021) yang membahas penerapan SIPADES pada enam desa di Kecamatan Jampangkulon dan Surade. Penelitian tersebut menemukan bahwa SIPADES membantu proses pencatatan dan inventarisasi aset, meskipun penerapannya belum berjalan maksimal di seluruh desa yang diteliti. Beberapa kendala yang ditemukan adalah keterampilan pengelola yang masih terbatas, aplikasi yang mengalami gangguan, dan kurangnya pelatihan. Dari penelitian tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan aplikasi memang dapat membantu pekerjaan administrasi, tetapi hasilnya tetap dipengaruhi oleh kemampuan orang yang mengoperasikannya. Dalam konteks Desa Angseri, penggunaan SIPADES berpotensi membuat pengelolaan aset lebih efektif dan efisien. Namun, untuk mengetahui apakah manfaat tersebut benar-benar sudah dirasakan, diperlukan informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan hasil penggunaannya.

d. Responsivitas

Responsivitas berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa dalam menanggapi permasalahan dan kebutuhan yang muncul dalam pengelolaan aset. Salah satu bentuk perhatian terhadap pengelolaan aset di Desa Angseri terlihat dari keikutsertaan pemerintah desa dalam rapat evaluasi aset bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan pada September 2025. Dalam kegiatan tersebut, pembaruan data inventaris, penertiban dokumen kepemilikan, dan optimalisasi pemanfaatan aset untuk kepentingan masyarakat menjadi beberapa hal yang perlu diperbaiki (Pemerintah Desa Angseri, 2025). Hal ini memperlihatkan bahwa pengelolaan aset desa masih membutuhkan evaluasi, bukan hanya dari sisi pencatatan, tetapi juga dari sisi pemanfaatannya. Dengan demikian, responsivitas pemerintah Desa Angseri sudah terlihat dari adanya keikutsertaan dalam kegiatan evaluasi, tetapi hasil tindak lanjutnya masih belum dapat dinilai secara menyeluruh.

Kendala dalam Pengelolaan Aset Desa melalui SIPADES

Walaupun SIPADES dapat membantu proses pencatatan aset, penerapannya tetap membutuhkan pengelolaan yang baik. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah pembaruan data inventaris. Data yang sudah dimasukkan ke dalam aplikasi harus disesuaikan apabila terjadi perubahan pada aset, baik penambahan barang, perubahan kondisi, maupun perubahan informasi lainnya. Jika data tidak diperbarui, informasi dalam aplikasi berisiko tidak sesuai dengan kondisi aset yang sebenarnya. Hal tersebut juga berkaitan dengan informasi evaluasi aset Desa Angseri pada September 2025. Dalam publikasi resminya, pemerintah desa menyebutkan bahwa pembaruan data inventaris dan penertiban dokumen kepemilikan

masih menjadi hal yang perlu diperhatikan (Pemerintah Desa Angseri, 2025). Artinya, penggunaan SIPADES masih perlu didukung dengan ketelitian dalam pencatatan dan kelengkapan dokumen administrasi. Kendala dalam penerapan SIPADES juga ditemukan dalam penelitian Prayitno (2021). Penelitian tersebut dilakukan pada enam desa di Kecamatan Jampangkulon dan Surade. Hasilnya menunjukkan bahwa empat dari enam desa yang diteliti belum menerapkan SIPADES secara maksimal. Hambatan yang ditemukan antara lain kurangnya keterampilan pengelola, gangguan pada aplikasi, dan kurangnya pelatihan dari pemerintah. Temuan ini memperlihatkan bahwa kemampuan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan penggunaan SIPADES. Penelitian lain yang dilakukan oleh Pobela, Karamoy, dan Lambey (2017) mengenai pengelolaan aset desa di Kota Kotamobagu juga menemukan beberapa kendala, seperti kompetensi sumber daya manusia, komunikasi, kepastian hukum, transparansi, dan komitmen organisasi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan aset desa tidak hanya membutuhkan sistem administrasi yang baik, tetapi juga dukungan dari pemerintah desa dan perangkat yang bertanggung jawab mengelolanya. Kedua penelitian tersebut dapat menjadi bahan perbandingan dalam membahas penerapan SIPADES di Desa Angseri. Meskipun dilakukan di wilayah yang berbeda, hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan aset desa memiliki tantangan yang tidak hanya berkaitan dengan aplikasi, tetapi juga kemampuan pengelola dan kelengkapan administrasi. Oleh karena itu, pemerintah Desa Angseri perlu memperhatikan pembaruan data, kelengkapan dokumen kepemilikan, serta kemampuan perangkat desa dalam menggunakan SIPADES. Berdasarkan hasil pembahasan, penggunaan SIPADES di Desa Angseri merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki pencatatan dan pengelolaan aset desa. Aplikasi ini membantu proses inventarisasi dan penyusunan laporan sehingga dapat mendukung prinsip akuntabilitas dan efektivitas administrasi. Namun, penerapannya masih perlu didukung dengan pembaruan data, dokumen kepemilikan yang lengkap, serta kemampuan petugas yang mengelola aset. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan aset desa tidak hanya ditentukan oleh penggunaan aplikasi, tetapi juga oleh bagaimana pemerintah desa menjalankan dan mengawasi proses pengelolaannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) 3.0 di Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, merupakan salah satu upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pengelolaan aset melalui digitalisasi administrasi. Penggunaan SIPADES membantu proses inventarisasi, pencatatan, penyimpanan data, verifikasi, serta penyusunan laporan aset desa agar lebih terstruktur dan mudah dikelola. Penerapan sistem ini juga menunjukkan adanya upaya pemerintah desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan responsivitas. Meskipun demikian, penerapan SIPADES di Desa Angseri masih menghadapi beberapa hal yang perlu diperhatikan. Berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan aset, pembaruan data inventaris dan penertiban dokumen kepemilikan masih menjadi aspek yang perlu diperbaiki. Selain itu, keterbukaan informasi kepada masyarakat serta tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi belum dapat dinilai secara menyeluruh berdasarkan data yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi digital belum sepenuhnya menjamin optimalnya pengelolaan aset desa apabila tidak didukung dengan administrasi yang

tertib dan kemampuan aparatur yang memadai. Pemerintah Desa Angseri perlu meningkatkan konsistensi dalam memperbarui data aset, melengkapi dokumen kepemilikan, serta meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengoperasikan SIPADES. Pemerintah desa juga perlu memperkuat pengawasan dan keterbukaan informasi mengenai aset kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, SIPADES tidak hanya digunakan sebagai alat pencatatan administratif, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan pengelolaan aset desa yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Hidayah, K., N., Sutikno, C., S., Pribadi, I., A., P., Amanda, A., Atika, Z., R. (2025). Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tambaksari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Studi Administrasi dan Ilmu Komunikasi, 2(3), 10-14. https://doi.org/10.62383/studi.v2i3.354

Humas Pemerintah Desa Angseri. (2026, Mei 18). Wujudkan Tata Kelola yang Akuntabel, Pemerintah Desa Angseri Ikuti Monev Pengelolaan Aset di Kantor Camat Baturiti. https://angseri.desa.id/artikel/2026/05/18/wujudkan-tata-kelola-yang-akuntabel-pemerintah-desa-angseri-ikuti-monev-pengelolaan-aset-di-kantor-camat-baturiti

Humas Pemerintah Desa Angseri. (2026, September 24). Pemerintah Desa Angseri Mengikuti Dua Agenda Penting Rapat Evaluasi Aset dan Validasi Data Pemilih. https://angseri.desa.id/artikel/2025/09/24/pemerintah-desa-angseri-mengikuti-dua-agenda-penting-rapat-evaluasi-aset-dan-validasi-data-pemilih

Kementerian Dalam Negeri. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset https://peraturan.bpk.go.id/Details/111552/permendagri-no-1-tahun-2016

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. https://share.google/VG4N0caOasmCvKkKP

Nasir. (2026). TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PENGELOLAAN ASET PEMERINTAH PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TAKALAR. MAJALAH ILMIAH METHODA, 16(2), 75-82.

Nurdianti, R., R., Sasanti, E., E., & Lenap, I., P. (2022). ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PENGELOLAAN ASET DESA (SIPADES) DI PEMERINTAH DESA PENDEM. Journal Risma, 2(4), 784-792.

Pemerintah Pusat. (2021). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. https://peraturan.bpk.go.id/Details/161841/pp-no-11-tahun-2021

Pemerintah Pusat. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014

Pobela, R. W., Karamoy, H., & Lambey, L. (2017). Analisis pengelolaan aset desa di Kota Kotamobagu. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill, 8(2). https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.18060

Prayitno, D. (2021). Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) terhadap Inventaris Desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen, 4(2), 78–82. https://doi.org/10.35326/jiam.v4i2.1300

Putri, S., A., B., Akbar, D., N, & Saefulrahman, I. (2026). Strategi Optimalisasi Pengelolaan Aset Desa Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADES) Dan Peningkatan Pelayanan Publik: Studi Kasus Di Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 12 (1.D), 110-121. https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12416

Tim Redaksi Website Desa Angseri. (2026, Januari 02). Desa Angseri Optimalkan Pengelolaan Aset Melalui Aplikasi SIPADES 3.0. https://angseri.desa.id/artikel/2026/01/02/desa-angseri-optimalkan-pengelolaan-asetmelalui-aplikasi-sipades-30

Ulfa, S., M., & Murtadlo, M., N. (2025). IMPLEMENTASI SIPADES DALAM ADMINISTRASI PENGELOLAAN ASET DESA SUMBER KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN BLORA. PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies, 4(3), 273-280. Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.